

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adjie, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Aminah, Siti, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Babbie, Judistira, K, 1999, *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif*, Primaco Akademika, Bandung.
- Fithry, Abshoril, 2013, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Perilaku Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadin, Ahmad Fikri 2013, *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Buku I Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichitar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Koentjoro, Diana Hakim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesi, Bogor.
- Lubis, Suhrawardi K, 2012, *Etika Profesi Hukum, Cetakan VI*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muttaqien, Raisul, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara, Cetakan I*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Tobing, Lumban G H S, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Tedjasaputra, Liliani, 1994, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigrat Publishing, Yogyakarta.

Volmar, H.V.A, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Rajawali, Jakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Gramedia, Jakarta.

Winata, Frans Hendra, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wignosoebroto, Soetandy, 2002, *Hukum; Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Huma-Elsam, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris Nomor 15 Tahun 2020, Berita Negara Nomor 545.

C. JURNAL

Mulia Fitri, Irma dkk., 2019, “Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur”, *Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 1 April 2019*, Universitas Syariah Kuala, Aceh.

D. INTERNET

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama, 2020, Majelis Pengawas Diminta Maksimal Dalam Tugas Pembinaan Dan Pengawasan Kepada Notaris, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/majelis-pengawas-diminta-maksimal->

[dalam-tugas-pembinaan-dan-pengawasan-kepada-notaris](#), diakses pada 07 Juli 2020.

INI.id, 2019, Pengawas Notaris Harus Tegas Dan Profesional, <https://ini.id/post/pengawas-notaris-harus-tegas-dan-profesional>, diakses pada 11 Maret 2019.

I Nyoman Gede Remaja, 2016, Pengaturan ADR (Alternative Dispute Resolution) Kajian Terhadap Undang-undang No 30 Tahun 1999, <http://www.fakultashukum-universitaspanjisakti.com%2Finformasi-akademis%2Fartikel-hukum%2F34-pengaturanalternativedisputeresolution-adr-kajian-terhadap-undang-undang-nomor-30-tahun-1999>, diakses pada 21 September 2016.

Kanwil Jabar, 2020, Kanwil Kumham Jabar Ikuti Sosialisasi Permenkumham No, 15 Tahun 2020, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/kanwil-kumham-jabar-ikuti-sosialisasi-permenkumham-no-15-tahun-2020>, diakses pada 07 Juli 2020.

E. TESIS

Triat Suci Rahamadani, 2009, *Peranan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rendy Permana Denta, 2017, *Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Belum Satu Tahun Berpratik Di Kabupaten Kulonprogo*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rusly, 2009, *Fungsi dan Tanggung Jawab Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Makassar Terhadap Akta Notaris Yang Telah Pensiun*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Bayu Nirwana, 2012, *Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Di Kabupaten Tangerang*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok.

Juliana Magdalena Tahalele, 2011, *Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawas Notaris (Studi Kota Ambon)*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.

Okta Jony Firmanzah, 2011, *“Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris (Studi Di Jakarta Timur)”*, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang.